

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Eesa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH TPAK, PDRB SEKTOR INDUSTRI, PDRB SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT “**.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Sishadiyanti S.E., M.M., CRMO., sebagai dosen pembimbing, atas waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof . Dr. Ir . Akhmad Fauzi, MMT., IPU, sebagai Rektor
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si, CFP., sebagai Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Bapak Riko Setya Wijaya, S.E.,M.M., sebagai Kepala Program
Studi Ekonomi Pembangunan
4. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan
yang telah memberikan ilmu nya selama proses perkuliahan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat indikator pada suatu wilayah hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan ekonomi agar terciptanya kesejahteraan serta keadilan pada masyarakat yang tercipta bila terciptanya pemerataan pada pembangunan (Sultan et al., 2023) serta selaras dengan tujuan nasional pada UUD 1945 terkait tentang salah satu tujuan yaitu kesejahteraan yang adil serta merata untuk seluruh masyarakat Indonesia . salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah ketimpangan pendapatan Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mencegah suatu negara agar dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT), yang merupakan kondisi suatu negara berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk bertransisi ke tingkat pendapatan tinggi (Widyastuti, Khoirudin, and Dahlan 2023).Ketimpangan pendapatan yang besar dapat memperburuk middle-income trap dan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut, karena dapat menurunkan daya beli masyarakat serta melemahkan konsumsi domestik. faktor yang memperburuk ketimpangan pendapatan Indonesia adalah ketimpangan antara sektor formal dan informal. Data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa sekitar 59% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal pada tahun 2023. Ketimpangan ini menciptakan perbedaan besar dalam pendapatan antara kedua sektor tersebut, yang pada gilirannya memperburuk kesenjangan pendapatan, terutama di daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Jawa Barat,

merupakan provinsi terkait urbanisasi tinggi, termasuk di kota-kota seperti Bandung, Bekasi, dan Cirebon yang berfungsi sebagai pusat ekonomi dan industri. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia, menempati urutan setelah Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta dengan indeks rasio gini sebesar 0,421. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 5,00% pada 2023, ketimpangan pendapatan yang masih besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat tidak bersifat inklusif. (Caesarisma and Hamrullah 2023)

Pada sektor industri pun lebih terfokus pada kota-kota seperti Bandung kemudian Bekasi serta Karawang yang terdapat kawasan industri sehingga pada kota tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan pada wilayah pedesaan berakibat pada pendapatan masyarakat pada daerah pedesaan relatif lebih rendah. Hal ini menyebabkan aktivitas perekonomian serta pembangunan yang tidak merata atau tidak berfokus pada seluruh wilayah seperti pada pusat industri yang terletak pada Kota Bekasi hingga Karawang dengan perekonomian yang tidak merata menyebabkan kemajuan pada suatu daerah tidak merata pula.

Kesenjangan di Jawa Barat tercermin pada terjadinya perbedaan pembangunan antar wilayah di Jawa Barat seperti pada daerah Bandung, Bekasi, Karawang yang berkembang pesat melalui Kawasan industri sebaliknya daerah seperti Garut, Pangandaran hingga Kuningan terdapat permasalahan seperti infrastruktur yang terbatas sejalan dengan jumlah penduduk miskin bulan September 2024 jumlah penduduk miskin perkotaan di Jawa Barat pada Maret tahun 2023 mencapai 7,19% sedangkan pada wilayah pedesaan Maret 2023 mencapai 9,07%. Serta terjadinya urbanisasi masyarakat pedesaan bermigrasi pada wilayah perkotaan di wilayah

bandung ,Bekasi ,Bogor untuk bekerja atau mencari pekerjaan yang berpengaruh terhadap kepadatan penduduk sebaliknya pada daerah asal akan berdampak pada kekurangan tenaga kerja produktif hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada wilayah kabupaten Bogor 5,68 juta jiwa pada tahun 2024

Indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi pada daerah melalui sdm pada daerah tersebut.sumber daya manusia di provinsi Jawa Barat melalui berbagai aspek yaitu usia,Pendidikan ,mata pencarian hingga tenaga kerja dengan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi Jawa Barat akan berpengaruh terhadap investasi pada tahun 2023 di semester 1 investasi di jawa barat sebesar 188 triliun serta berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia Badan Pusat Statistik IPM Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2022 IPM Jawa Barat mencapai 72,9% kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 73,5% beberapa kota yaitu Bekasi ,Bandung mencapai IPM tertinggi sehingga Sumber Daya Manusia berkualitas .melalui kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh pada produktivitas kerja jika SDM rendah berdampak pada produktivitas rendah ,tingkat Pendidikan rendah akan berdampak pada masyarakat bekerja di sektor informal sehingga ketimpangan pendapatan akan semakin meningkat selain itu menurut Sjafrizal (2008) sumber daya alam yang memiliki perbedaan antar daerah berdampak ketimpangan pembangunan antara daerah . kesenjangan sumber daya alam di Jawa Barat bagian selatan terdapat potensi tambang hingga Kawasan konservasi akan tetapi akses infrastruktur di wilayah selatan yang terbatas serta rawan bencana sesuai dengan indeks rasio bencana di bagian selatan yang tergolong tinggi mencapai 145,81 sedangkan pada wilayah utara memiliki potensi seperti pertanian serta infrastruktur lebih maju berdasarkan indikator ketimpangan

pendapatan Indeks Williamson Jawa Barat tahun 2020 mencapai 0,692 bahwa ketimpangan pendapatan di Jawa Barat mengalami peningkatan meskipun produktivitas Jawa Barat tinggi serta IPM Jawa Barat mencapai 72,9% salah satu penyebab ketimpangan pendapatan .salah satu penyebab ketimpangan pendapatan adalah salah satunya tenaga kerja atau sumber daya manusia .

Provinsi Jawa barat menurut rasio gini salah satu Provinsi ketimpangan pendapatan tertinggi urutan ketiga setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 0,421 akan tetapi terdapat beberapa kekurangan seperti kurang sensitif mengenai perubahan distribusi pendapatan pada masyarakat menengah serta memiliki fokus mengukur ketimpangan pendapatan dalam distribusi pendapatan pada individu akan tetapi terdapat indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang lebih spesifik dalam menganalisis ketimpangan antar suatu wilayah yaitu dengan menggunakan indeks Williamson.ketidakseimbangannya perekonomian seperti perbedaan di wilayah dengan kemajuan yang cepat dengan wilayah yang tertinggal menyebabkan ketimpangan pendapatan tinggi . Selain itu dapat dilihat pada distribusi penduduk miskin di bulan September tahun 2022 persentase terkait penduduk miskin di Jawa Barat pada perkotaan mencapai 7,52% dibandingkan pada wilayah perdesaan yang mencapai 9,57% hal tersebut berdampak pada ketimpangan pendapatan pada wilayah perdesaan .

Fenomena akan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sumber daya alam yang berbeda pada setiap daerahnya hingga kondisi sosial ekonomi pada daerah tersebut. pada suatu wilayah .hal ini sejalan dengan penelitian (Ni'mah, 2019)yang menjelaskan meskipun ketimpangan pembangunan yang rendah akan tetapi ketimpangan pendapatan meningkat. indikator digunakan mengukur ketimpangan

pendapatan pada penelitian ini yaitu Indeks Williamson yang memiliki penilaian yaitu nilai indeks mendekati 0 wilayah tersebut ketimpangan pendapatan yang merata akan tetapi saat nilai mendekati angka 1 maka pada wilayah akan mengalami ketimpangan.

Permasalahan ketimpangan pendapatan permasalahan merupakan permasalahan serius bagi negara berkembang hingga negara maju yang membedakan permasalahan ini terletak pada tingkat kesenjangan yang terjadi pada daerah tersebut ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi pada wilayah-wilayah pada suatu negara . menurut bank dunia terdapat kriteria untuk menilai ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah jika 40 persen penduduk terbawah pada suatu wilayah mempunyai pengeluaran kurang 12 persen akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan dianggap tinggi sementara pengeluaran suatu penduduk berkisar pada 12 hingga 17 persen berdampak ketimpangan pendapatan dianggap sedang .namun 40 persen penduduk terbawah pada suatu wilayah dengan pengeluaran lebih dari 17 persen maka dapat dinyatakan ketimpangan pendapatan rendah (Badan Pusat Statistik). selain itu penjelasan mengenai ketimpangan pendapatan menurut Badan Pusat statistik dapat diuraikan kondisi saat tingkat pendapatan sesama individu yang tidak merata , indikator yang menjelaskan ketimpangan pendapatan salah satunya yaitu indeks Williamson pengukuran ketimpangan pendapatan .

Berdasarkan data Worldometers pada tahun 2022 indonesia menduduki peringkat 15 dengan negara terluas di dunia serta menduduki peringkat ke 4 jumlah penduduk akan tetapi menurut indikator Indeks Williamson dan rasio kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) pada antar regional memperlihatkan tingginya

ketimpangan antar wilayah di Indonesia ,Indeks Williamson antar provinsi Indonesia periode 2005 ke 2020 menunjukkan bahwa tidak mengalami penurunan yaitu pada tahun 2005 Indeks Williamson mencapai 0,78 di tahun 2020 turun hanya mencapai 0,75 serta perkembangan terkait distribusi PDRB regional terhadap nasional pemerataan belum terjadi pada kurun waktu 16 tahun terakhir . Pada negara berkembang seperti Indonesia ketimpangan pendapatan terlihat jelas pada daerah pedesaan serta perkotaan selain itu pada sektor formal maupun informal ketimpangan pendapatan ini dapat berdampak pada kondisi social pada suatu daerah seperti kemiskinan hingga kesejahteraan masyarakat .Salah satu indikator pengukuran ketimpangan pada antar wilayah yaitu dengan menggunakan Indeks Williamson melalui pendekatan PDRB Per kapita pada suatu daerah .Ketimpangan Pendapatan terjadi disebabkan oleh pembangunan antar suatu daerah yang tidak merata hal ini disebabkan seperti pembangunan pada suatu daerah yang terdapat sumber daya tinggi akan memiliki pengaruh terkait pertumbuhan ekonomi sehingga produktivitas masyarakat karakteristik wilayah ,SDA ,sumber daya manusia hingga pada geografis sehingga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi tidak merata

kelebihan penggunaan indeks Williamson dalam indikator dalam menilai ketimpangan pendapatan suatu daerah yaitu yang terfokus pada perbedaan sektor formal dengan informal di suatu daerah kemudian dengan menggunakan indeks Williamson lebih spesifik dalam pengukuran ketimpangan pendapatan akan tetapi indeks Williamson memiliki kekurangan atau keterbatasan seperti ketimpangan antar individu tidak menggambarkan hal ini dikarenakan terfokus pada ketimpangan antar sektor kemudian sensitif terkait definisi wilayah yang akan diperhitungkan maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan indikator indeks Williamson

sebagai pengukuran ketimpangan pendapatan di Jawa barat dapat membandingkan pembangunan serta mengukur secara spesifik terkait kesenjangan pembangunan variabel pada pengukuran indeks Williamson produk domestik bruto per kapita pada setiap wilayah .

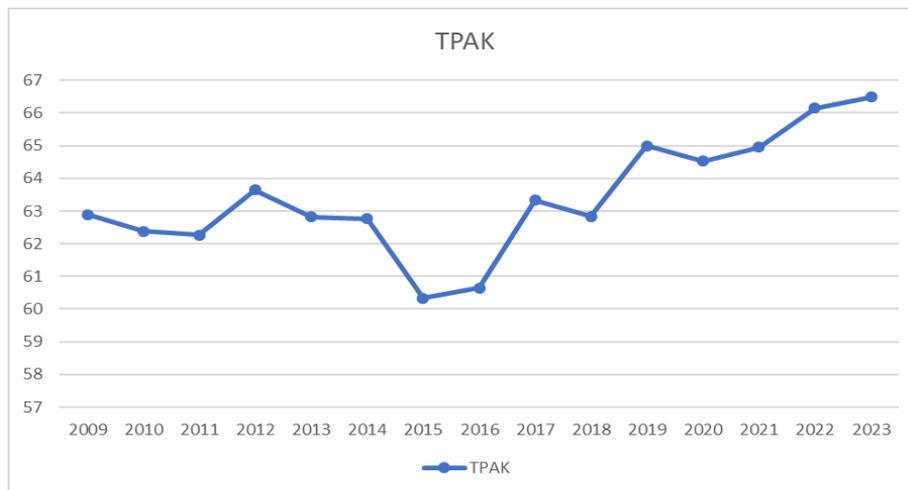
Keadaan perekonomian pada suatu daerah berkaitan erat pada Gross Domestic Product (GDP) hal ini dikarenakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah terdapat pada pertumbuhan ekonomi maka dari itu jika naik hingga turunya ekonomi akan berdampak pada sektor lainya seperti pada pertumbuhan ekonomi meningkat berdampak pada pendapatan per kapita suatu wilayah meningkat pula. Menurut Simon Kuznet pada mengenai penjelasan tentang Hipotesis Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi di saat awal distribusi pendapatan mengarah menurun .akan tetapi setelah tahap awal tersebut maka distribusi pendapatan akan membaik yang disebut dengan Kurva Kuznet “U -terbalik”.selain itu berdasarkan pandangan Kuznets mengenai distribusi pendapatan saat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah mencapai pada tahap yang matang akan berdampak pada distribusi pendapatan yang lebih merata .ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan distribusi yang tidak sebanding antara total pendapatan nasional pada berbagai rumah tangga di suatu negara (Istikharoh et al., 2020)

Pada penelitian (Laut et al., 2020) bahwa TPAK memiliki pengaruh serta menjadi faktor disparitas pendapatan indonesia dikarenakan total tenaga kerja di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid -19. sehingga menggambarkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat yang semakin tinggi hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesenjangan terhadap orang kaya serta miskin yang menunjukkan adanya trade-off

pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan pada wilayah. meskipun telah banyak penelitian mengenai ketimpangan pendapatan akan tetapi terdapat beberapa kesamaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya seperti metode penelitian analisis regresi linear berganda kemudian variabel tingkat partisipasi Angkatan kerja pada penelitian ini .akan tetapi terdapat pembeda seperti periode waktu penelitian yang digunakan pada penelitian ini dalam kurun waktu 2009 hingga 2023 serta PDRB sektor yang digunakan merupakan sektor yang mendominasi Provinsi Jawa Barat yaitu PDRB sektor industri pengolahan , PDRB sektor perdagangan ,resparasi mobil serta sepeda motor.

Tenaga kerja yang berkualitas merupakan faktor berpengaruh ketimpangan pendapatan dikarenakan pada suatu wilayah dengan produktivitas tinggi cenderung mempunyai pendapatan tinggi daripada wilayah dengan produktivitas yang rendah . sehingga produktivitas memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan suatu wilayah berdasarkan tingkat produktivitas masyarakat .negara indoensia merupakan negara yang menghadapi bonus demografi hal ini berdampak pada total Angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan total bukan Angkatan kerja. angkatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah pekerja yang berada pada lingkup perekonomian pada waktu tertentu yang memiliki 2 klasifikasi yaitu kelompok sedang bekerja serta kelompok yang pada waktu tersebut menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan . selain itu terdapat indikator yang memiliki peranan penting dalam pembangunan pada suatu negara tingkat partisipasi Angkatan kerja sebagai indikator ketenagakerjaan terkait penduduk pada suatu wilayah aktif pada ekonomi hal ini juga berkaitan pada jumlah penduduk dengan kategori bukan Angkatan kerja meningkat maka akan berpengaruh jumlah Angkatan kerja yang

menurun turut memiliki dampak pada tingkat partisipasi Angkatan kerja menjadi lebih rendah .tingkat partisipasi angkatan kerja juga dihitung melalui membagi antara jumlah orang yang bekerja , yang pada waktu tersebut mencari pekerjaan total dari penduduk usia kerja .



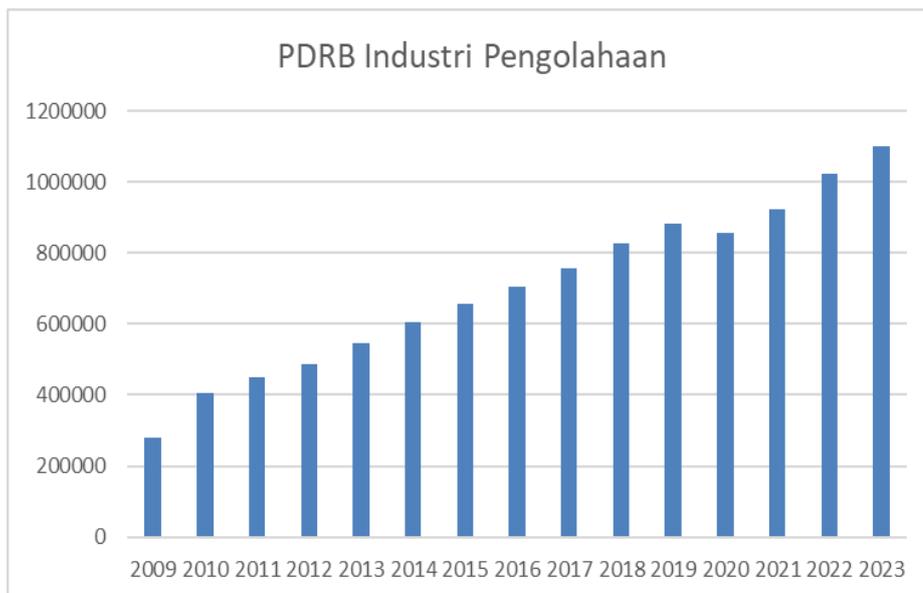
Gambar 1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat 2009-2023

Sumber :Badan Pusat Statistik 2009-2023

Pada gambar 1.2 tingkat partisipasi Angkatan kerja Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan tren stabil pada kurun waktu 2009 hingga 2023 . pada tahun 2023 TPAK mencapai 66,49 dengan TPAK tertinggi sementara tahun 2015 TPAK Menurun 60,34 sementara tahun 2017 hingga tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan tren stabil namun pada tahun 2018 menurun sebesar 62,84 kemudian tahun selanjutnya tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja kembali naik 66,49. sejalan dengan penelitian sebelumnya (Nilasari & Amelia, 2022) hubungan antara tingkat partisipasi Angkatan kerja dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif akan tetapi terdapat penelitian sebelumnya

(Wijayanti et al., 2023) menjelaskan bahwa hubungan tingkat partisipasi Angkatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif .

Salah satu penyebab ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah disebabkan perbedaan kemampuan wilayah dalam aspek menciptakan pertumbuhan ekonomi .ketimpangan pendapatan gambaran dari pertumbuhan ekonomi belum merata bagi masyarakat.selain tingkat partisipasi Angkatan kerja pertumbuhan ekonomi faktor mengakibatkan ketimpangan pendapatan disebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat memiliki dampak ketimpangan pendapatan yang meningkat . indikator keberhasilan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan kecil.serta perkembangan pada kinerja sektoral pun turut menjadikan tolak ukur pembangunan ekonomi . peranan PDRB dalam hal pertumbuhan ekonomi jika PDRB suatu wilayah tinggi maka pertumbuhan ekonomi wilayah tinggi dan sebaliknya .perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat munculnya industri pengolahan menjadikan sektor industri pengolahan berkontribusi pada perekonomian Provinsi Jawa Barat .



Gambar 1.2. PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat 2009-2023

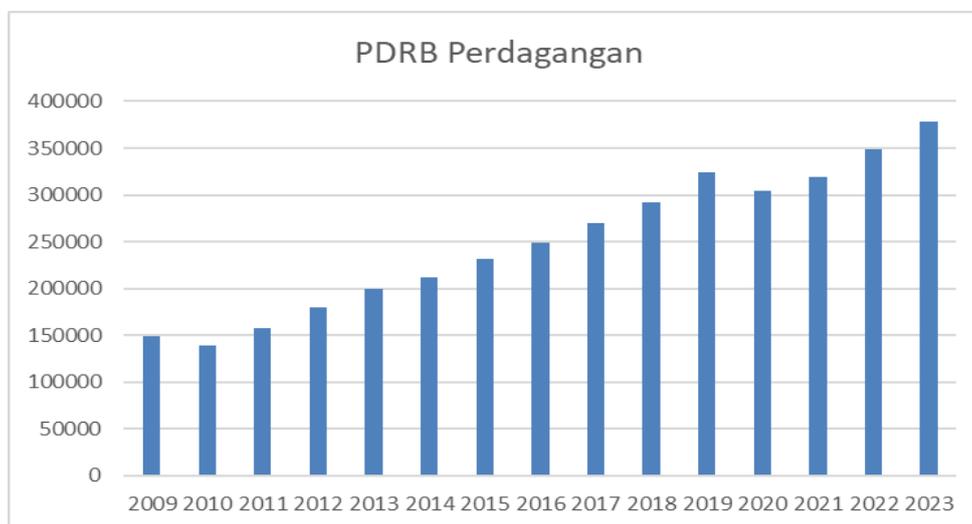
Sumber: Badan Pusat Statistik 2009-2023

gambar 1.3 yang menunjukkan PDRB sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2009 hingga 2023 terlihat dari tahun 2009 PDRB industri pengolahan yang mencapai hingga pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 281275.34 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 856103.7 . Pada tahun 2023, sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha, dengan kontribusi sebesar 2,04 persen serta mencatat pertumbuhan sebesar 4,74 % selain itu Pada tahun 2023, struktur PDRB Jawa Barat berdasarkan lapangan usaha berdasarkan dasar harga berlaku mendominasi dari sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 41,87 persen. meskipun PDRB pada sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya namun pemerataan ekonomi yang tidak terlaksana yang berdampak pada tingginya

ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat .industri pengolahan memberikan kontribusi dalam PDRB Jawa Barat seperti pada tahun 2014 struktur perekonomian pada Jawa Barat yang mendominasi sektor industri pengolahan ,perdagangan besar serta eceran, resparasi mobil , sepeda motor . selain itu dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 industri pengolahan menyerap tenaga kerja terbesar daripada sektor lainnya serta didukung oleh sekitar 60 persen industri pengolahan indonesia terletak pada Jawa Barat dari total 74 kawasan industri tersebar ,40 terletak di Jawa Barat .selain itu nilai serta kontribusi industri pengolahan pada tahun 2010 mencapai 42,08 kemudian tahun 2011 41,97 hingga tahun 2012 mencapai 41,07 meskipun mengalami penurunan akan tetapi sektor industri pengolahan sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian Jawa barat

Sektor perdagangan ,resparasi mobil , sepeda motor merupakan salah satu sektor selain sektor industri pengolahan menopang perekonomian Jawa Barat seperti Pada tahun 2023, struktur PDRB Jawa Barat menurut lapangan usaha berdasarkan dasar harga berlaku didominasi sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 41,87 persen, disusul perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 14,43 persen serta mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,36%.selain itu pada tahun 2022 sektor PDRB Jawa Barat tahun 2022 sektor perdagangan menempati peringkat kedua setelah sektor industri dengan struktur PDRB 14,40% serta laju pertumbuhan yang mencapai 4,22%.pada tahun 2014 sektor perdagangan menduduki struktur perekonomian setelah industri pengolahan kemudian menurut analisis sektor basis sektor perdagangan besar serta eceran, reparasi mobil ,sepeda motor,memiliki nilai location quotient lebih besar satu ($LQ > 1$) yang dapat dijelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor sehingga Jawa Barat mempunyai proportional share yang besar dibandingkan pada daerah lain. Selain itu kontribusi sektor tahun 2010 mencapai 21,75 kemudian pada tahun 2011 mencapai 22,08 pada tahun 2012 sebesar 23,20 menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat. menunjukkan sektor perdagangan reparasi mobil, sepeda motor dari tahun 2010 hingga tahun 2023 salah satu sektor yang mendominasi terkait kontribusi terhadap struktur PDRB Jawa Barat.

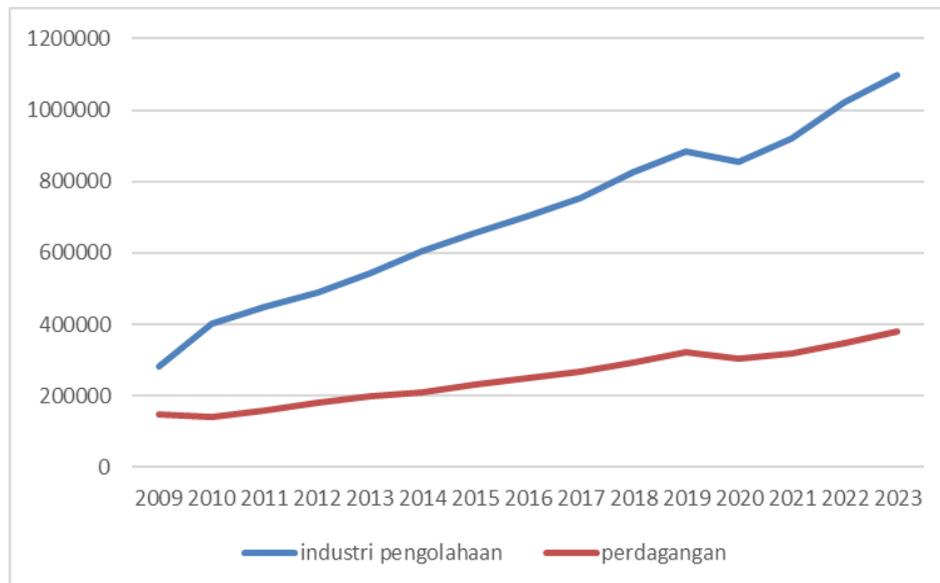


Gambar 1.3. PDRB Sektor Perdagangan Resparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Jawa Barat 2009-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009-2023

Gambar 1.4 PDRB sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan trend mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2009 hingga pada tahun 2023 pada tahun 2009 yang sebesar 149056.86 meskipun tahun 2020 hingga tahun 2021 penurunan akan tetapi tahun 2023 sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami kenaikan sebesar 378832.69. sehingga dari grafik

tersebut dapat dilihat bahwa sektor tersebut berkontribusi terhadap total PDRB Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.4 PDRB Sektor Perdagangan Resparasi Mobil dan Sepeda Motor Dan PDRB Industri pengolahan Provinsi Jawa Barat 2009-2023

Sumber:Badan Pusat Statistik 2009-2023

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa PDRB Sektor Perdagangan Resparasi Mobil dan Sepeda Motor Dan PDRB Industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan atau meningkat setiap tahunnya yang dapat diartikan bahwa terdapat produksi yang meningkat serta pendapatan pada industri pengolahan yang meningkat .sehingga produksi yang meningkat seperti barang-barang hasil olahan, seperti makanan, tekstil, kimia, dll., berpengaruh pada total Pendapatan Domestik Regional Bruto yang turut meningkat disebabkan aktivitas ekonomi yang produktif pada sektor industri pengolahan.Selain itu PDRB sektor perdagangan yang meningkat dapat diartikan terdapat peningkatan pada volume transaksi dagang, pada skala besar maupun eceran. seperti elektronik, fashion,serta

layanan seperti reparasi mobil dan sepeda motor. Meningkatnya sektor ini biasanya disebabkan oleh permintaan pasar yang meningkat serta terkait efektivitas operasional bisnis pada sektor perdagangan.

Penelitian Terdahulu "Sa'diatun Ni'mah(2023)" dengan judul Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendapatan Sektor (Industri dan Pertanian), serta Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pengetahuan dan Kesehatan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2015–2021 menjelaskan bahwa pendapatan sektor industri berpengaruh negatif ,tidak signifikan kemudian penelitian menjelaskan bahwa TPAK berpengaruh negatif sertatidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat perbedaan seperti variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja kemudian variabel yang digunakan menggunakan pendapatan sektor industri pengolahan serta perdagangan dengan indikator ketimpangan pendapatan Indeks Williamson dengan analisis regresi linear berganda .

Permasalahan ketimpangan pendapatan terjadi di setiap negara termasuk Indonesia . dari penjabaran mengenai faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan lokasi Provinsi Jawa Barat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor tingkat partisipasi Angkatan kerja ,PDRB sektor industri pengolahan kemudian PDRB sektor perdagangan ,reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peran dalam permasalahan ketimpangan pendapatan akan tetapi nilai tingkat partisipasi Angkatan kerja ,PDRB sektor industri pengolahan kemudian PDRB sektor perdagangan ,reparasi mobil dan sepeda motor belum dapat mengatasi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat sehingga disimpulkan bahwa

permasalahan tersebut ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan kompleks sehingga penulis akan meneliti secara spesifik.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dirumuskan permasalahan mengenai penelitian :

1. Apakah pengaruh tingkat partisipasi angkatan angkatan kerja terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah pengaruh PDRB Sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah pengaruh PDRB sektor perdagangan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan indeks Williamson di Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah sehingga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Sektor industri pengolahan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor perdagangan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan provinsi Jawa Barat berdasarkan perhitungan indeks Williamson di Provinsi Jawa Barat

1.4 Ruang lingkup

keterbatasan penelitian dilakukan peneliti sehingga memutuskan bahwa terdapat batasan penelitian agar fokus penelitian dapat terjaga .batasan penelitian terdiri dari analisis faktor ketimpangan pendapatan pada Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada tingkat partisipasi angkatan kerja ,PDRB sektor industri pengolahan,PDRB sektor perdagangan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.gabungan antara Analisis Indeks willianson kemudian analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji asumsi klasik,uji heteroskedastisitas,uji normalitas ,uji autokorelasi, uji multikolinearitas.yang akan menunjukkan bagaimana kondisi perekonomian kemudian ketimpangan pendapatan serta pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja,PDRB Sektor industri Pengolahan,PDRB Sektor Perdagangan, Resparasi mobil dan sepeda motor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat manfaat sebagai berikut :

1. penelitian ini memberikan dampak yang berguna bagi masyarakat umum yang dapat digunakan untuk sumber pengetahuan.selain itu memberikan informasi mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat nantinya dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah daerah serta penelitian dijadikan perbandingan terkait penelitian terdahulu di Provinsi Jawa Barat serta untuk
2. menilai perkembangan pembangunan di Indonesia, terutama mengenai kesenjangan dalam pendapatan.jadi informasi dari penelitian ini dapat dijadikan diskusi hingga referensi terkait kemajuan pada ilmu pengetahuan serta penelitian yang selaras di masa mendatang